

Ulasan Film

Sa Ada di Sini:

Perempuan Papua di Antara Adat dan Negara

Ryan Richard Rihi

Universitas Kristen Indonesia

Yosua Hiluka

Universitas Kristen Indonesia



Durasi : 38 menit
Produser : Galuh Wandita
Pemain : Kelompok Kerja Papua, Para Perempuan Papua
Tahun : 2017
Genre : Dokumenter

Korespondensi Penulis:

Ryan Richard Rihi, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

E-mail: ryanrichardrihi@gmail.com

Yosua Hiluka, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

E-mail: hilukayosua@gmail.com

Hasil Riset Dalam Film

Riset aksi partisipatif perempuan asli Papua dilakukan oleh Kelompok Kerja Papua untuk Perempuan (*Papuan Women's Working Group (PWG)*) yang bekerja sama dengan *Asia Justice & Rights* dan *Act V Doc*. Hasil riset ini tersaji dalam sebuah video dokumenter berjudul *Sa Ada di Sini*. Riset yang dilakukan di enam lokasi di seluruh tanah Papua ini di antaranya dilakukan di: Sorong, Biak, Jayapura, Jayawijaya (Wamena), Keerom dan Merauke. Riset ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali akar permasalahan perempuan yang dilakukan dengan metode membuka kesempatan bagi perempuan untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh perhatian pemerintah hingga ke tingkat nasional. Adapun ulasan terhadap film *Sa Ada di Sini* tertuang dalam uraian di bawah ini.

“Sa Ada di Sini”

Film *Sa Ada di Sini* dimulai dengan menampilkan kehidupan keluarga yang sederhana di Wamena, Jayawijaya, seorang ibu bersama enam anggota keluarga lain tinggal dalam sebuah rumah beratap alang-alang yang tidak cukup luas. Keluarga ini sehari-hari mengolah makanan untuk dimakan bersama. Ubi yang dijual di pasar, bagi keluarga kecil ini umumnya tidak dapat dikonsumsi dikarenakan jumlah anggota keluarga yang cukup banyak. Ditambah lagi, harga ubi yang mencapai Rp10.000 hingga Rp20.000 per tumpuk.

Menurut Frida Klasin, narasumber dari Kelompok Kerja Papua untuk Perempuan, jika kita berbicara tentang perempuan di Papua, maka sebetulnya perempuan di Papua dapat mewakili seluruh aktivitas dari masyarakat. Karena, dengan melihat dari aktivitas ekonomi riil di Papua, tampak bahwa perempuan mengambil

peran yang sangat penting. Aktivitas masyarakat Papua di ruang publik, seperti pasar, didominasi oleh perempuan. Sekalipun demikian, fakta yang ada menunjukkan bahwa hari-hari ini pasar yang menunjang aktivitas perempuan Papua dinilai belum memadai, masih beralaskan karung di lantai, di mana masyarakat berjualan di dekat jalan raya. Akan tetapi, sekalipun kondisinya demikian, perempuan Papua tetap melanjutkan aktivitas jual-beli (Wandita & Yolanda, 2017).

Menurut seorang ibu peserta *Participatory Action Research* (PAR) dari Sorong yang adalah seorang penjual di pasar, mereka berjualan sejak pagi hari hingga pukul 18.00 petang. Banyak perempuan yang turut serta berjualan. Mereka memperjualbelikan berbagai komoditi. Lebih lanjut, menurut Frida Klasin, kekuatan ekonomi perempuan Papua sungguh luar biasa; namun sayangnya, kekuatan ekonomi tersebut belum dikelola secara baik.

Dalam berita yang beredar, menurut salah satu anggota Kelompok Kerja Papua untuk Perempuan, walikota atau bupati telah menyediakan pasar bagi mama-mama Papua.¹ Menurut Frida Klasin, jika sudah ada niat baik pembangunan pasar untuk mama-mama Papua, maka hal itu perlu segera dilaksanakan. Di saat yang sama, diperlukan adanya proteksi produk lokal yang dihasilkan oleh mama-mama Papua seperti pinang, sagu, dan lain sebagainya. Hal ini karena mama-mama Papua harus bersaing dengan masyarakat dari seluruh nusantara. Masyarakat pendatang yang ikut berjualan itu umumnya bermodal besar, tetapi turut menjual komoditi yang sama. Menurut salah seorang pedagang pinang, banyak penjual datang dari berbagai kota seperti Bitung, Manokwari, Ternate, dan lain-lain. Menurut peserta PAR lain dari Keerom, untuk setumpuk pinang dari pohon yang dijual kepada penjual lain, jika harga

¹ Pada tahun 2014, dalam kampanyenya Presiden Joko Widodo memberikan janji untuk membangun pasar bagi mama-mama Papua. Pasar dimaksud baru diresmikan pada bulan Maret 2018.

sekarang turun maka pinang setumpuk hanya dijual Rp10.000. Akan tetapi, jika harga sedang naik, maka setumpuk pinang tersebut dapat dijual Rp. 20.000 hingga Rp. 30.000. Pinang tersebut bila dijual lagi di pasar akan mencapai harga Rp. 50.000.

Film ini kemudian menampilkan hal lain terkait dengan keberadaan perempuan Papua yaitu soal kesehatan perempuan Papua. Frida Klasin menuturkan bahwa banyak permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan tubuh perempuan. Aktivitas perempuan dinilainya memengaruhi kesehatan mereka. Terkait dengan itu, menurutnya, salah satu hak dasar yang memengaruhi kesehatan perempuan Papua adalah ketersediaan air bersih. Ia mengatakan bahwa air bersih di Papua jauh untuk dijangkau. Padahal, air bersih adalah kebutuhan yang mendasar dalam menopang aktivitas rumah tangga dan kegiatan berkebun (Timor, 2017)

Pada saat melakukan kegiatan bersama kelompok perempuan, mereka ditanya mengenai pola kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam mengambil air. Oleh seorang ibu diinformasikan bahwa jika terjadi musim kering, maka aktivitas untuk mengambil air dilakukan sejak pagi hari, dan pada pukul 13.00 siang, mereka baru akan kembali ke rumah. Para perempuan yang akan mengambil air ini harus menunggu agar air dapat naik dan terkumpul terlebih dahulu dalam sumur umum yang dimiliki masyarakat. Aktivitas ini dilakukan oleh banyak orang. Dalam kondisi tertentu, orang yang mengambil air harus mengalah untuk kepentingan orang lain terlebih dahulu. Bahkan, jika tidak mendapatkan air pada siang hari tersebut karena jumlah air terbatas, maka mereka harus mengambil air pada pukul 12.00 malam hingga pukul 01.00 dini hari.

Meneliti langsung di lapangan, tim periset mengajak beberapa ibu mendatangi tempat masyarakat mengambil air. Di tempat itu ditemukan bahwa masyarakat

mengambil air dari sebuah sumur. Di dalam sumur tersebut air sangat sedikit jumlahnya, dan hanya ada pada bagian dasar. Karenanya, bagi masyarakat yang ingin mengambil air harus menunggu agar air tersebut bertambah jumlahnya selama beberapa waktu. Alat yang digunakan dalam mengambil air di dasar sumur tersebut cukup sederhana, jeriken² bekas tempat minyak dan sepotong tali. Menurut keterangan yang diberikan oleh seorang peserta PAR dari Merauke, daerah di mana penelitian sedang dilakukan saat itu, sumur di sana sebelumnya memiliki kuantitas air yang banyak. Akan tetapi, oleh karena kemarau yang panjang yang sudah berlangsung selama dua tahun, akibatnya terjadi kekeringan dan kekurangan air sebagaimana saat wawancara berlangsung. Ia melanjutkan pengakuannya bahwa kekeringan seperti ini belum pernah terjadi di masa-masa yang lalu. Sekalipun dulu terjadi masa-masa kering, tetapi tidak pernah seburuk seperti saat wawancara berlangsung (Kanedi, 2017).

Dalam film ini kemudian didokumentasikan aktivitas seorang perempuan yang sedang mengambil air dan dituangkan ke sejumlah jeriken berukuran lima liter. Di saat yang bersamaan, seorang ibu yang bertindak sebagai narasumber menginformasikan bentuk penggunaan air bersih yang ada. Satu buah jerikennya membutuhkan beberapa saat untuk dihabiskan. Dalam aktivitas rumah tangga seperti mencuci beras dan sayur, bahkan dibutuhkan satu hingga dua jeriken air. Lebih lanjut diinformasikan oleh narasumber yang sama, aktivitas-aktivitas menimba air ditempat umum dan kemudian mengangkut ke rumah seluruhnya dilakukan oleh perempuan. Disebutkan bahwa kaum pria atau suami tidak dapat mengambil air, dan harapan diletakkan pada

²Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jeriken/*je-ri-ken*/ */jérikén/* adalah: **1** tempat (bensin, air, minyak tanah, dan sebagainya) biasanya berisi 20 liter, dibuat dari logam atau plastik, berbentuk empat persegi panjang, pipih, dan berkepala sempit; **2** wadah serupa itu, tetapi lebih kecil. Bentuk tidak baku dari Jeriken lebih dikenal masyarakat umum dengan sebutan Jerigen.

para istri yang bersangkutan.³ Jika tempat penampungan yang dimiliki banyak atau besar maka akan memakan waktu pengambilan air beberapa kali bahkan sampai sore hari.

Dalam film kemudian ditampilkan aktivitas seorang perempuan yang membawa air dari sumber air bersih yang tersedia, kemudian dibawa ke rumah atau tempat tujuannya. Sambil berjalan dengan bertelanjang kaki dan berpakaian lusuh, perempuan ini membawa hingga enam jeriken air sekaligus dengan menggunakan noken, yaitu tas tradisional orang Papua yang digunakan untuk membawa berbagai barang sesuai dengan ukuran tas tersebut. Menurut pengakuan narasumber yang sama, menggunakan noken membuat kepala dan punggungnya merasakan sakit.

Frida Klasin bertutur bahwa kaum perempuan yang mengambil air menganggap aktivitas yang mereka lakukan adalah hal yang lumrah. Menyikapi fenomena ini, diskusi dengan para perempuan yang pergi mengambil air dilakukan bersamaan dengan sosialisasi hak-hak dasar kepada yang bersangkutan. Diskusi dimaksudkan untuk membawa pencerahan dan kesadaran mengenai eksistensi air bersih sebagai salah satu hak dasar perempuan. Para perempuan tersebut kemudian disosialisasikan mengenai transportasi sebagai bagian dari hak dasar yang harus tersedia (Wandita & Yolanda, 2017).

Dalam film kemudian didokumentasikan kegiatan lainnya menyoroti eksistensi perempuan. Bersama dengan peneliti, perempuan berupaya mengaktualisasikan metodologi peta tubuh. Dalam film ditampilkan saat beberapa orang ibu terbaring secara terlentang di atas karton, lalu sketsa atau peta tubuh mereka digambar oleh

³Dalam budaya Papua, para istri yang seringkali berperan dalam mengurus keluarga dan mengolah kebun.

rekan yang lain. Di saat yang bersamaan, film kemudian menuturkan pengakuan dari salah seorang peserta terkait hubungan rumah tangga dengan suaminya yang pertama. Ia mengakui bahwa hubungan mereka berdua tidak harmonis. Rumah tangganya tidak bahagia sebab ia kerap menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti kekerasan fisik hingga kekerasan verbal berupa caci maki. Ia merasa bahwa kehidupannya saat itu tidak manusiawi akibat pengalaman yang dialaminya tersebut. Implikasi dari kekerasan fisik yang dialaminya menyebabkan kesehatan jantungnya memburuk. Merujuk pada peta tubuh miliknya, narasumber yang sama menjelaskan mengenai pengalaman-pengalaman yang dialaminya seperti sakit kepala yang sering ia rasakan akibat pukulan fisik maupun benturan dengan botol wiski.

Berdasarkan pengakuan antropolog sekaligus peneliti senior asal Papua, Mientje Roemiak, dengan metodologi peta tubuh yang telah dibuat, didapati bahwa sekitar 70-80% perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Seorang ibu peserta PAR dari Wamena kemudian menceritakan kisah kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Ia pernah berada dalam satu kondisi, dimana saat itu ia dan suami berpapasan dari arah berlawanan. Kemudian suaminya memukulnya pada bagian pinggang menggunakan sebatang kayu. Ia bahkan mengakui bahwa kejadian tersebut menyebabkan tulang rusuknya menjadi bengkok. Lebih lanjut diakuinya bahwa diwajahnya juga terdapat bekas pukulan dan pendarahan yang dialami. Mientje Roemiak berpendapat bahwa hal ini sangat menakutkan karena kaum perempuan tidak hanya dipukul melainkan menerima akibat hingga dijahit atau tulang yang retak dan patah (Wandita & Yolanda, 2017).

Peserta PAR dari Wamena melanjutkan pengakuannya. Ia memberi kesaksian pada saat rahang bawahnya hampir terlepas karena dipukul dengan batu yang besar.

Pukulan itu menyebabkan mulutnya berdarah dan harus dijahit sebanyak tiga jahitan. Hidungnya juga mengalami beberapa kali tindak kekerasan sehingga berdarah berulang kali. Mientje Roembiak berpendapat bahwa kekerasan berulang-ulang yang dialami kaum perempuan itu merupakan tindak kejahatan. Ia kemudian mempertanyakan mengenai siapa yang akan bekerja, oleh sebab kaum perempuanlah yang biasanya berkebun, mengelola sumber alam menjadi pangan, dan menjual hasil produksi kebunnya. Kemudian, Ibu dari Wamena tersebut mengakui bahwa ia seringkali bekerja dan membawa barang yang cukup berat menggunakan noken. Ia sekarang sering merasakan sakit dan pada saat tidur merasa tidak nyaman.

Pengakuan lanjutan datang dari peserta PAR yang kepalanya dibentur dengan botol wiski. Ia mengatakan bahwa tangannya pernah patah oleh sebab dipukul menggunakan kayu balok. Hal yang lebih memprihatinkan, tangannya tidak pernah dibawa berobat oleh sebab ancaman yang diterimanya. Ia diancam untuk tidak pergi ke rumah sakit, melakukan rontgen dan mendapatkan perawatan. Akibat ancaman itu, tangannya dirawat secara alami saja dengan bantuan seorang ibu untuk mengurut tangannya. Akan tetapi, usaha tersebut membuat tangannya tidak sembuh dengan baik, justru tangannya menjadi bengkok.

Mientje Roembiak memandang bahwa budaya kekerasan merupakan tindakan peniruan di dalam keluarga. Jika seorang ayah memukul istrinya, kemudian dipandang oleh seorang anaknya sebagai hal yang biasa, maka di kemudian hari ia akan berkelakuan yang sama seperti ayahnya. Sehingga menurutnya jika kekerasan terhadap perempuan di Papua diklasifikasi cukup tinggi, itu dikarenakan budaya turut mendukung terjadinya hal tersebut. Lebih lanjut menurut pengakuan ibu di atas, anaknya juga pernah tidak memiliki uang untuk berobat. Pernah juga ketika ia memiliki

keluhan akibat dampak kekerasan yang dialaminya dan membutuhkan perawatan, ia tidak memiliki uang untuk membiayai perawatan tersebut. Pada akhirnya ia harus kembali mengadu kepada orang tuanya. Seorang ibu yang bekerja di pasar menceritakan bahwa jika ia ingin pergi berobat, biaya tetap dibutuhkan sekalipun memiliki kartu sehat (Papua, 2013).

Kejadian ini ditanggapi oleh narasumber dari Kelompok Kerja Papua untuk Perempuan (PWG), Pastor Anselmus Amo. Menurutnya, berkaitan dengan masalah kesehatan selalu timbul pertanyaan bahwa bagi orang Papua, ada dana otonomi khusus yang besar, tetapi ketika sakit, masyarakat Papua mengalami banyak kendala seperti penolakan bahkan tempat rujukan yang tidak jelas. Menurut penelitian, ketika masyarakat sakit mereka akan pergi ke Puskesmas. Mereka tidak perlu membayar jika memiliki kartu berobat. Tapi di Puskesmas, masyarakat mengakui dipersulit dengan kewajiban memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Di lain sisi, menurut pengakuan lebih lanjut oleh narasumber yang saat itu berjualan di pasar, ia mengatakan bahwa program BPJS oleh pemerintah adalah tipuan belaka. Yang terjadi adalah rekayasa semata untuk memenuhi laporan ke Jakarta. Kenyataannya dalam pengobatan tetap diperlukan sejumlah uang. Seringkali masyarakat pergi untuk menebus obat yang diminta; tetapi ditolak dengan alasan tidak adanya obat yang dicari, lalu direkomendasikan untuk mencari obat di tempat lain. Hal ini membuat masyarakat merasa jengkel karena resep yang harus ditebus terlalu mahal harganya dan membuat masyarakat tidak dapat membelinya.

Menurut Pastor Anselmus Amo, memang didengarnya bahwa obat-obat yang ditebus gratis, tetapi ia tidak menemukan fakta yang demikian. Ada dana yang telah disediakan, namun ia mempertanyakan mengapa tidak digunakan untuk mencukupkan

obat-obatan. Ia turut mempertanyakan alasan rujukan dokter untuk mencari obat di tempat lain yang faktanya obat tersebut berada di apotek pribadi dokter yang bersangkutan.

Zandra Mambrasar, narasumber dari Kelompok Kerja Papua untuk Perempuan (PWG) mengemukakan bahwa berbagai masalah yang terjadi di Papua saat ini tidak terlepas dari konflik yang berkepanjangan di Papua. Secara historis, konflik yang terjadi dimulai pada tahun 1963 saat terjadinya penyerahan secara administratif oleh pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia saat itu ditugaskan untuk mengurus Persiapan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Kemudian tercatat bahwa pada tahun 1969 terjadi penangkapan dan penahanan terhadap orang-orang Papua. Sebelum dan setelah pelaksanaan Pepera, ada pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di hampir seluruh wilayah Papua. Kemudian, sejarah merekam terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada saat Reformasi Indonesia di tahun 1998. Setelah itu, pemberian otonomi khusus (Otsus) Papua hingga saat ini (Perempuan, 2010).

Menurut pengakuan salah satu korban kekerasan pada masa setelah pemberlakuan DOM di Papua, yakni seorang ibu yang berasal dari Biak, ketika masa itu, beliau ditembak dan peluru menghantam tangannya hingga luka. Ia kemudian harus melarikan diri ke kebun dan tinggal di hutan. Mengenang masa itu, ia mengatakan bahwa tentara bertindak sangat kejam. Orang-orang yang ditemukan oleh tentara saat itu pasti akan dibunuh; tidak peduli laki-laki atau perempuan akan dibunuh. Menurut pengakuan lain dari seorang ibu yang berasal dari Jayapura, pada saat itu dia bersama dengan seorang yang lain harus tinggal di hutan karena ketakutan terhadap tentara. Ia mengatakan bahwa tahun 1981 hingga tahun 1983 adalah tahun-tahun yang sulit bagi

mereka. Bahkan, pada saat saudara laki-lakinya pulang dari kebun, keesokan harinya ia diculik oleh tentara. Adiknya tersebut hingga saat ini tidak pernah kembali (HAM, 2015).

Menurut pengakuan lain dari seorang ibu yang berasal dari Biak, beliau harus ikut-ikutan lari dan sembunyi di kebun. Mereka tidak dapat melawan karena tidak memiliki senjata. Pengakuan lanjutan dari ibu yang berasal dari Jayapura, bahwa dia tinggal di hutan selama tujuh tahun. Ia tinggal di hutan bersama dengan anaknya yang saat itu masih balita. Jika mereka tidak punya susu untuk bayinya, ia akan memasak daun pandan. Ia memasak daun tersebut hingga mendidih dan menjadi susu. Kemudian ia harus membersihkan dan mendinginkan susu tersebut. Ia kemudian menambahkan sedikit gula dalam susu tersebut, lalu meminum terlebih dahulu dan kemudian memberikannya pada bayinya.

Pada tahun 1970, seorang ibu yang berasal dari Biak, mengakui menikah bersama suaminya di hutan. Kemudian, pada tahun 1972, ia melahirkan anaknya yang pertama di hutan. Beberapa minggu kemudian, tentara mendatangi daerah mereka untuk mencari orang-orang yang terlibat dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Saat tentara datang, mereka mulai melakukan aksi penembakan sejak pukul 07.00 pagi hari hingga sekitar pukul 10.00 pagi. Saat itu beliau menggendong bayinya dan bersembunyi di depan rumah mereka. Ketika tentara menembak, peluru menghantam bagian pinggang bayinya dan tembus hingga daerah sekitar bahu dan leher bayi tersebut. Bayi yang ditembak itu kemudian meninggal pada saat itu. Tentara-tentara itu meninggalkan sejumlah korban meninggal. Korban yang selamat dalam penembakan itu hanyalah dirinya.

Seorang peserta PAR lain dari Jayapura mengakui bahwa ia pernah mengalami penyiksaan oleh Tentara Nasional Indonesia. Ia mengalami sejumlah bentuk penyiksaan seperti penyetruman. Ia juga dikurung dan juga direndam di dalam air. Menurut pengakuan peserta PAR lain dari Jayapura, pada malam hari ia mengalami penyiksaan. Saat itu anaknya bahkan dimasukkan ke dalam lumpur. Ia mengakui bahwa ia mengalami penyiksaan di tengah-tengah rumput yang tinggi. Ketika itu ia berniat untuk pergi mencari suaminya. Saat tiba di sungai, ia kembali mengalami penyiksaan. Ia kembali dipukul. Ia berteriak meminta tolong pada Tuhan. Tidak ada orang di sekitar tempatnya berteriak. Ditambah lagi, pada saat kejadian tersebut waktu telah malam; akibatnya tidak ada orang yang mendengar teriakannya. Ia kemudian menyanyikan sepenggal lagu rohani Kristen yang berbunyi “Ingat dalam susah dan dibala: Jangan putus asa, Tuhan adalah! Jangan gentar, hatimu resah. Nanti waktu siang, engkau bergemar.”

Secara visual, film ini kemudian mendokumentasikan sekelompok mama-mama atau ibu-ibu Papua tengah beraktivitas membuat noken. Menurut pengakuan salah seorang ibu di dalam kelompok tersebut, mereka membuat noken untuk dijual guna membiayai sekolah anak-anak mereka. Salah seorang fasilitator dari Jayawijaya, Mully Wetipo, mengatakan bahwa pada tahun 1977 hingga tahun 1978, secara umum masyarakat Pegunungan Tengah di Papua, khususnya masyarakat Jayawijaya, keseluruhan perkampungan tersebut dibumihanguskan. Peristiwa itu dikenang sebagai kejadian 1977-1978. Bahkan, hingga saat ini pihak pemerintah, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), menganggap wilayah tersebut sebagai ‘zona merah’.

Mully Wetipo menginformasikan bahwa ibu-ibu yang tengah didokumentasikan dalam film *Sa Ada di Sini* adalah para janda. Mereka menjadi janda sebab suami-suami mereka telah dibunuh dalam peristiwa 1977-1978 itu. Sekarang ini mereka menjadi kepala keluarga. Mully Wetipo mengatakan bahwa pihaknya tengah berupaya untuk membangun jejaring sosial antara kelompok ibu-ibu janda dengan masyarakat sekitar, dan dengan pemerintah daerah di Jayawijaya.

Pada adegan berikutnya, seorang petugas medis mengatakan bahwa kesehatan masyarakat di daerah tersebut harus diperiksa dengan baik. Ia mengatakan bahwa obat-obatan yang ada hanya sedikit. Ketika petugas kesehatan pergi, maka masyarakat tidak terlayani. Ia juga mengakui bahwa stok obat-obatan yang ada di rumah sakit juga sedikit. Status 'zona merah' yang masih ada menurut Mully Wetipo membawa sejumlah dampak. Dampak yang pertama adalah terjadinya pembatasan terhadap interaksi janda-janda ini dengan warga sekitar. Yang kedua, akses terhadap pelayanan publik seperti jaminan kesehatan dan bantuan-bantuan sosial terbatas.

Seorang ibu dari Jayapura menyampaikan bahwa ia mengerjakan kebun dan menjual hasilnya untuk mendapatkan uang. Pada tahun sebelumnya, uang yang didapatnya digunakan untuk membiayai pengobatan matanya karena ia sulit melihat. Seorang peserta PAR lain yang harus tinggal di hutan selama tujuh tahun mengakui bahwa ia kerap kali merasakan sakit di bagian punggung. Memikul noken membuat punggungnya sakit. Ternyata dua tulang belakangnya mengalami peretakan. Ia juga tidak pergi ke rumah sakit untuk berobat karena malu. Zandra Mambrasar menyimpulkan bahwa sebagai akibat dari dampak kekerasan berkelanjutan yang terjadi, perempuan mengalami diskriminasi dari segala aspek kehidupan, menderita penyakit dan tinggal dalam kemiskinan.

Frida Klasin, narasumber dari Kelompok Kerja Papua (PWG) mengatakan bahwa orang-orang Papua memiliki filosofi bahwa tanah dan hutan adalah ibu yang memberi kehidupan. Dalam perkembangan zaman, terjadi pengurusan terhadap sumber daya alam (Paino, 2017). Hal ini mengakibatkan pergeseran pemikiran masyarakat Papua. Menurutnya, tanah tidak lagi dilihat sebagai sumber hidup melainkan tanah dipandang sebagai komoditi untuk menghasilkan uang. Film ini kemudian mendokumentasikan aktivitas dua orang ibu di tengah perkebunan di Wamena. Ibu ini mengatakan bahwa dikebunnya, mereka menanam ketimun dan sawi tetapi kemudian ada hama bagi tanamannya itu. Ubi juga ditanam tetapi kecil isinya. Mereka juga hanya panen sekali saja dan tidak ada yang bisa disimpan. Tanah milik mereka kini telah dijual. Tanah itu dijual oleh adik laki-lakinya dengan bayaran sejumlah uang dan beberapa ekor babi, tetapi penjualannya belum final. Tanah itu dijual dengan disembunyikan, ibu yang bersangkutan baru menerima informasi setelahnya.

Di Papua, menurut Frida Klasin, garis keturunan yang ada mengikuti garis laki-laki. Hal ini menimbulkan pemahaman bahwa perempuan tidak memiliki hak secara langsung terkait kepemilikan tanah adat. Di lain sisi, perempuan Papua hanya memiliki hak berupa hak makan maupun hak mengelola. Jika berkaitan dengan rencana menjual atau akan dipakai oleh pihak lain, perempuan sama sekali tidak diberi akses untuk ikut memberikan pendapat. Akibatnya, hasil yang ada tidak dibagi kepada perempuan. Hal ini menyebabkan kaum perempuan mengalami pemiskinan. Dengan kata lain, pemiskinan kaum perempuan Papua disebabkan oleh adat. Mientje Roembiak mengatakan bahwa hal ini merupakan masalah di Papua. Perempuan dipandang tidak lagi memiliki sumber daya, padahal kaum perempuan terlibat dalam menjaga hutan dan

kebun. Di saat yang sama perempuan mengelola hutan dan kebun tersebut menjadi sumber kehidupan, dan kehidupan berasal dari kaum perempuan.

Seorang peserta PAR dari Keerom mengatakan bahwa sebagai orang asli Papua, mereka memiliki kebun dan menanam pinang. Tetapi berkaitan dengan keberadaan kelapa sawit, hal itu hampir-hampir tidak dinikmati oleh kelompok masyarakat asli Papua. Ketika memiliki kelapa, mereka harus mengeluarkan uang untuk membiayai pekerja untuk memetik kelapa tersebut, kemudian membayar orang untuk membawa kelapa tersebut ke pinggir jalan, menyewa truk yang mengangkut ke pabrik. Untuk memasuki kawasan pabrik diperlukan biaya untuk bernegosiasi dengan pihak pabrik agar dapat didahulukan masuknya truk ke dalam pabrik. Jika masyarakat tidak memiliki uang untuk membiayai sejumlah keperluan tersebut, maka mereka terpaksa harus menunggu bahkan bermalam hingga dua sampai tiga hari. Supir truk terkadang lebih mengutamakan bekerja mengangkut muatan yang lain dibandingkan kelapa sawit. Terkadang kelapa-kelapa sawit yang ada ditinggalkan hingga membusuk di pinggir jalan. Akhirnya mereka menyimpulkan bahwa pengeluaran lebih besar dibanding keuntungan. Lalu masyarakat memberi kontrak kepada orang asing atau orang luar atas tanah milik mereka selama enam bulan, satu tahun, dua tahun hingga lima tahun. Bahkan ada pihak yang langsung berupaya mengubah kepemilikan sertifikat atas tanah masyarakat. Kelapa sawit yang dimiliki masyarakat pada akhirnya hanya menjadi hiasan bagi mereka, sebab hasilnya tidak mereka nikmati.

Frida Klasin mengatakan bahwa perempuan tidak memiliki hak milik maupun hak untuk membuat keputusan terhadap hutan, dusun bahkan terhadap sungai dan pantai. Karena itu disimpulkan bahwa inilah yang menjadi titik awal pemiskinan perempuan yang terus mengalir ke generasi-generasi dibawahnya.

Narasumber dari Keerom melanjutkan penuturannya; mereka merasakan bahwa hutan yang masyarakat miliki beserta dengan kayu-kayu di dalamnya telah habis digantikan dengan kelapa sawit. Mata pencaharian yang biasa mereka lakukan dengan berburu di daerah sekitaran hutan pun turut sirna. Ini kemudian dipertanyakan oleh Frida Klasin; dengan kondisi yang terjadi seperti saat ini, jika masyarakat khususnya kaum perempuan tidak lagi memiliki hutan, maka dapatkah dikatakan bahwa perempuanlah si penjaga hutan? Karena hutan yang luas dan besar itu tidak lagi menjadi tanah adat milik dari masyarakat. Pastor Anselmus Amo turut mengatakan bahwa masyarakat yang dulunya memiliki tanah, kini telah diserahkan kepada perusahaan. Apabila suatu waktu terjadi ketidakadilan, maka akan timbul masalah baru. Inilah yang menjadi pikiran perempuan, karena merekalah yang mengusahakan hidup dalam tradisi Papua.

Seorang peserta PAR dari Wamena mengatakan bahwa mereka menanam banyak sayuran, akan tetapi pembeli sangat sedikit. Ia tidak mengetahui alasan di baliknya, entah karena tidak adanya uang atau alasan yang lainnya. Sayuran miliknya ingin dijual, akan tetapi tidak laku sehingga ia membiarkan sayuran tersebut tidak dijual. Saat ini sudah ada perubahan dengan hadirnya dana otonomi khusus. Sayangnya, menurutnya, dana itu justru memanjakan laki-laki sehingga mereka pindah tinggal di kota. Akibatnya, kaum perempuan yang di desa, kini menggunakan celana pendek dan bekerja mengusahakan kebun yang ada. Selain itu, semakin sedikit laki-laki yang mengusahakan kebun sehingga membuat seolah-olah tanggung jawab milik perempuan saja.

Menurut Frida Klasin, kaum perempuan mengakui bahwa mereka belum merasakan manisnya otonomi khusus. Ibu yang berasal dari Wamena kembali

mengemukakan bahwa sepengetahuan mereka kehadiran otonomi khusus baik adanya. Bahwa di dalam otonomi khusus ada sejumlah bantuan, tetapi pada kenyataannya, setelah menunggu beberapa waktu, mereka merasa tertipu. Seorang ibu yang lain mengatakan bahwa di Papua dana otonomi khusus telah diterima oleh orang-orang Papua. Akan tetapi, menurutnya hal tersebut hanya tipu muslihat semata. Dana tersebut, menurutnya lebih dinikmati oleh pejabat-pejabat yang mengelolanya dan belum dinikmati oleh mereka sebagai masyarakat kecil. Frida Klasin kemudian melanjutkan penuturannya bahwa seringkali saat berbicara mengenai otonomi khusus, orang-orang kerap mengidentifikasi hal tersebut sebagai bantuan dana. Akan tetapi, tatkala berbicara mengenai otonomi khusus, sesungguhnya hal itu tidak semata-mata tentang bantuan dana, melainkan juga harus berbicara tentang hak perempuan Papua dalam kehadiran kebijakan otonomi khusus. Kondisi ini perlu dipahami dengan baik agar melahirkan pendekatan-pendekatan yang manusiawi tanpa membuahkan kebijakan yang seolah-olah bentuk belas kasihan (Wandita & Yolanda, 2017).

Film ini kemudian mendokumentasikan kegiatan fasilitator. Nampak Ibu Frida Klasin sedang memberikan sosialisasi kepada sekelompok perempuan dalam suatu pertemuan. Di pertemuan tersebut, Frida Klasin menyampaikan kepada kaum perempuan bahwa berdasarkan adat sebenarnya perempuan dapat berbicara. Selama ini perempuan tidak boleh berbicara dalam rapat adat, padahal hal itu diperbolehkan. Perempuan adalah manusia dan turut memiliki hak yang sama seperti kaum laki-laki. Biasanya, saat duduk bersama, seringkali perempuan dianggap remeh. Akan tetapi, bagi kaum perempuan yang telah mengikuti pertemuan yang mereka adakan, dihimbau untuk bisa menyampaikan pendapat dalam pertemuan adat di kampung. Kaum perempuan perlu untuk menyampaikan kepada kepala kampung bahwasanya mereka

juga memiliki hak, sebab merupakan warga negara. Kaum perempuan dihimbau menyampaikan permasalahan mereka, seperti sakit kepala yang seringkali dialami karena mengangkat air, dan sebagainya. Perempuan harus menyampaikan bahwa mereka membutuhkan air bersih. Dana kampung yang ada perlu diminta untuk pengadaan air bersih terlebih dahulu.

Kaum perempuan memiliki hak untuk berbicara. Oleh salah satu peserta pertemuan dikatakan bahwa sebelum mengikuti pertemuan dimaksud, ia seringkali berada di belakang atau di dapur saja karena adat mengharuskan hanya kaum pria yang ada di depan. Tetapi dengan mengikuti pertemuan selama dua hari tersebut, ia merasa bahwa kaum perempuan dilatih untuk berbicara; untuk mengemukakan bahwa mereka ada, dengan segenap pengalaman dan pendapat mereka. Ia diberi kepercayaan sebagai perempuan adat untuk berbicara di depan, untuk berbicara kepada sesama dan kepada kaum pria sebagai tokoh adat. Ia turut menghimbau kaum perempuan yang hadir pada pertemuan tersebut, agar ketika pulang mereka dapat berbicara kepada kaum pria atau pemimpin adat. Mientje Roembiak menambahkan bahwa pemerintah memiliki banyak kebijakan, akan tetapi, kebijakan yang berpihak pada kaum perempuan dinilai tidak ada.

Seorang ibu peserta pertemuan yang sama mengatakan bahwa masih banyak suara perempuan-perempuan asli yang tidak didengar. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Demikian ungkapannya. Kaum perempuan perlu berbicara untuk meregenerasi orang muda untuk kemudian kembali meregenerasi agar dapat berbicara kepada pemerintah, media, dan masyarakat setempat untuk melibatkan kaum perempuan. Hal ini agar tidak semata-mata melibatkan hanya satu atau dua orang saja, padahal kaum perempuan ada untuk dilibatkan. Kaum perempuan bisa untuk terlibat.

Pada akhirnya, Frida Klasin menuturkan bahwa penyadaran komunitas harus dimulai dari kaum perempuan. Kesadaran untuk menjaga hutan, sungai, dan kampung dimulai dari kaum perempuan. Bahkan kesadaran untuk membangun kembali kampung, menurutnya dimulai oleh kaum perempuan. Hal itu karena perempuanlah yang terlibat langsung dengan lingkungan sekitar yang disebut hutan. Film ini ditutup dengan menampilkan aktivitas seorang ibu yang sedang dalam perjalanan pulang dari bekerja di hutan, membawa bawaan seperti sayur, payung, dan sebagainya; kemudian juga ditampilkan anak-anak yang tengah mandi di sungai dengan gembira.

Film *Sa Ada di Sini* di Mata Mahasiswa Asal Papua

Sejak awal Papua diintegrasikan ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap rakyat Papua terus terjadi, seperti antara lain pelanggaran hak-hak sosial, hak terhadap politik, hak terhadap pendidikan, hak terhadap wilayah, dan pelanggaran hak terhadap kultur. Hingga saat ini, sudah ada beberapa lembaga nasional untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM; antara lain Kontras yang berdiri 20 Maret 1998, Lembaga Bantuan Hukum yang berdiri 20 Oktober 1970, dan Komnas HAM yang berdiri 7 Juni 1993. Akan tetapi, persoalan pelanggaran HAM yang secara khusus dilakukan terhadap kaum perempuan tidak kunjung menemukan penyelesaian. Kompleksitas kondisi yang dialami perempuan korban pelanggaran HAM nampak dalam film dokumenter *Sa Ada di Sini*.

Penulis melihat secara riil bahwa banyak kaum hawa atau ibu-ibu Papua yang belum mendapatkan hak-hak hidup yang bebas, makmur, dan sejahtera. Mereka terkurungdalam ketegangan, intimidasi, haknya dibatasi, menerima kekerasan dan dijadikan seperti orang nomor dua. Hal seperti ini terjadi karena kurangnya peran

penting pemerintah di dalamnya. Contoh kasus di mana seharusnya pemerintah dapat mengambil tindakan, namun diabaikan, yang ada dalam film ini: kelapa sawit dan tanah dibeli oleh orang non-Papua dan dijadikan tempat berbisnis, sumber air bersih untuk masyarakat belum pernah dibuat, pasar dikuasai oleh non-Papua, dan kepala rumah tangga yang melakukan kekerasan terhadap kaum hawa karena kurangnya sosialisasi pemerintah tentang kekerasan terhadap perempuan dan sumber daya manusia yang minim kapasitas.

Kaum Hawa mendapatkan hal serupa karena pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten belum menanggapi kasus-kasus namun hanya diabaikan saja. Menurut penulis, pemerintah melihat hal-hal seperti ini biasa. Namun sebenarnya, hal seperti ini akan berdampak besar bagi generasi muda-mudi Papua, sangat berpengaruh dalam pola pikir, gaya hidup, lingkungan dan berpengaruh pada pertumbuhan hidup. Pemerintah sebagai jembatan untuk rakyat harus meneliti semua persoalan yang terjadi di lingkup masyarakat Papua dan melakukan solusi-solusi untuk menangani problem-problem tersebut.

Penulis sebagai perwakilan mahasiswa/i berharap kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten bisa menangani kasus-kasus seperti ini, agar secara umum Pemerintah bisa melihat semua kasus seperti: pendidikan, sosial, kultur, HAM, politik, dan kesehatan di berbagai kawasan Pulau Cendrawasih. Penulis sebagai salah satu mahasiswa Papua yang saat ini berstudi di Jakarta mengucapkan banyak terima kasih kepada tim periset yang peduli terhadap kaum perempuan Papua dan sudah turun langsung meneliti di Provinsi Papua dan Papua Barat yang hasilnya direkam dalam film dokumenter berjudul *Sa Ada di Sini*.

Penulis mewakili generasi muda–mudi Papua yang berkuliah di luar Papua siap untuk berikut membangun daerah Papua. Dengan demikian penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan sang Pencipta dan tak lupa juga kepada siapapun yang bekerja untuk Papua meskipun mereka di luar Papua. Salam kompak untuk kita semua.

Referensi

- HAM, K. P. (2015). *Anyam Noken Kehidupan: Papua Tanah Damai Menurut Perempuan Penyintas Kekerasan dan Pembela HAM*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kanedi. (2017, Oktober 7). *Perempuan Papua: Derita di Atas Gelimang Dana Otsus*. Retrieved November 1, 2018, from <http://www.watyutink.com>
- Paino, C. (2017, Januari 15). *Ketika Suku-Suku di Papua Berupaya Mempertahankan Tanah Adat Mereka*. Papua, Papua, Indonesia.
- Papua, P. B. (2013, Agustus 23). *Mientje Roembiak: Tantangan Budaya bagi Perempuan Papua Masih Kuat*. Retrieved November 1, 2018, from <http://www.jubi.co.id>
- Perempuan, K. (2010). *Enough is Enough! Testimonies of Papuan Women Victims of Violence and Human Rights Violations 1963-2009*. Jakarta: Documentation Working Group on Violence and Human Rights Violations Against Papuan Women.
- Timor, K. I. (2017, Oktober 7). *Sa Ada di Sini: Suara Perempuan Menghadapi Konflik yang Tak Kunjung Usai*. Papua, Papua, Indonesia.
- Wandita, G., & Yolanda, S. (2017). *Sa Ada di Sini: Suara Perempuan Papua Menghadapi Kekerasan yang Tak Kunjung Usai*. Papua: Papuan Women's Working Group.